

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Lapopran Keuangan
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1	Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab V	Penjelasan pos pos laporan Keuangan	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing masing pos pos pelaporan keuangan
		5.1.1 Pendapatan
		5.1.2 Belanja
		5.1.3 Beban
		5.1.4 Aset
		5.1.5 Kewajiban
		5.1.6 Ekuitas Dana
Bab VI	Penjelasan atas informasi informasi non keuangan	
Bab VII	Penutup	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, Januari 2019
Camat

Zemmy Hasz, SE
NIP 19611115 199103 1 005

1.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2016 berupa Pendapatan retribusi daerah adalah nihil.

Realisasi Belanja baik belanja operasi dan belanja modal pada TA 2018 adalah sebesar 30.432.934.174 atau mencapai 92,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 32.880.404.295.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 39.018.236.855 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp109.623.725; Aset Tetap (neto) sebesar Rp38.792.658.859; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 115.954.271,00.

Nilai Kewajiban Rp 7.869.299.366,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Jumlah beban adalah sebesar Rp. 28.958.004.513,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp19.311.454.029,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(28.958.004.513,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp47.948.784.032,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp38.302.233.540,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

BAB I PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan kecamatan Bontang Utara disusun sebagai pertanggungjawaban Camat Bontang Utara atas pelaksanaan tahun anggaran 2015. Laporan Keuangan sebagai bentuk informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Kecamatan Bontang Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara, adalah :

- Untuk menyajikan informasi detail mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bentuk evaluasi bagi para pengguna dan pedoman dalam membuat dan mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- Untuk menyajikan informasi yang memenuhi prinsip-prinsip Laporan Keuangan yaitu relevan, akuntabel oleh seluruh sumber daya di Kecamatan Bontang Utara

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
- Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB II KEBIJAKAN EKONOMI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro / Regional Ekonomi Makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, Ekonomi Makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan dan pasar, ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan perkembangan ekonomi makro dan diselaraskan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai Program dan Kegiatan melalui APBD Kota Bontang, dengan perjalanan waktu diperlukan adanya perubahan anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi makro yang ada dan Perwujudan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program dan Keegiatannya yang berpihak kepada rakyat.

Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2018 juga dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Utara sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut : Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan

- keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap
- jenis belanja; Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun
- pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Indikator Kecamatan Bontang Utara sebagai fungsi Tata Pemerintahan

Pencapaian Target : berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut

- Kinerja APBD
- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
 - b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada good governance dan clean government;
 - c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
 - d. Meningkatkan tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
 - e. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian dan pengawasan.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan pada Kecamatan Bontang Utara Ta
Pencapaian Target Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :
Kinerja Keuangan

	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi
Pendapatan Th 2018	Rp -	Rp -	
Belanja Tidak Langsung	Rp 16.541.094.995	Rp 14.977.983.411	90,5501
Belanja Langsung	Rp 16.339.309.300	Rp 15.364.386.663	94,0333
Belanja Th 2018	Rp 32.880.404.295	Rp 30.342.370.074	92,281

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kecamatan Bontang Utara antara lain :

- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi perencanaan, utamanya da penyusunan perubahan anggaran tahun berjalan, sehingga realisasi.
- Terjadinya kenaikan belanja pegawai pada kelompok belanja t langsung merupakan realisasi belanja yang tidak dapat dihir sebagai akibat kebijakan dari Pemerintah Pusat.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Tujuan entitas pelaporan keuangan adalah untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah, utamanya dalam lingkup SKPKD.

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Bontang Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi e finance yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada SKPD

Aplikasi e finance terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM-Aset). E Finance dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIM Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi **A.3. Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi Kecamatan Bontang Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kecamatan Bontang Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh **Pemerintah Kota Bontang**. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara adalah sebagai berikut:

Belanja

(1) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Beban

(2) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(3) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas

negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/ daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(4) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(5) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyusutan Aset Tetap

(6) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama kali*

(7) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrua sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

BAB V PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan
Rp 0,

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 pada Kecamatan Bontang Utara nihil. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan uang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. .

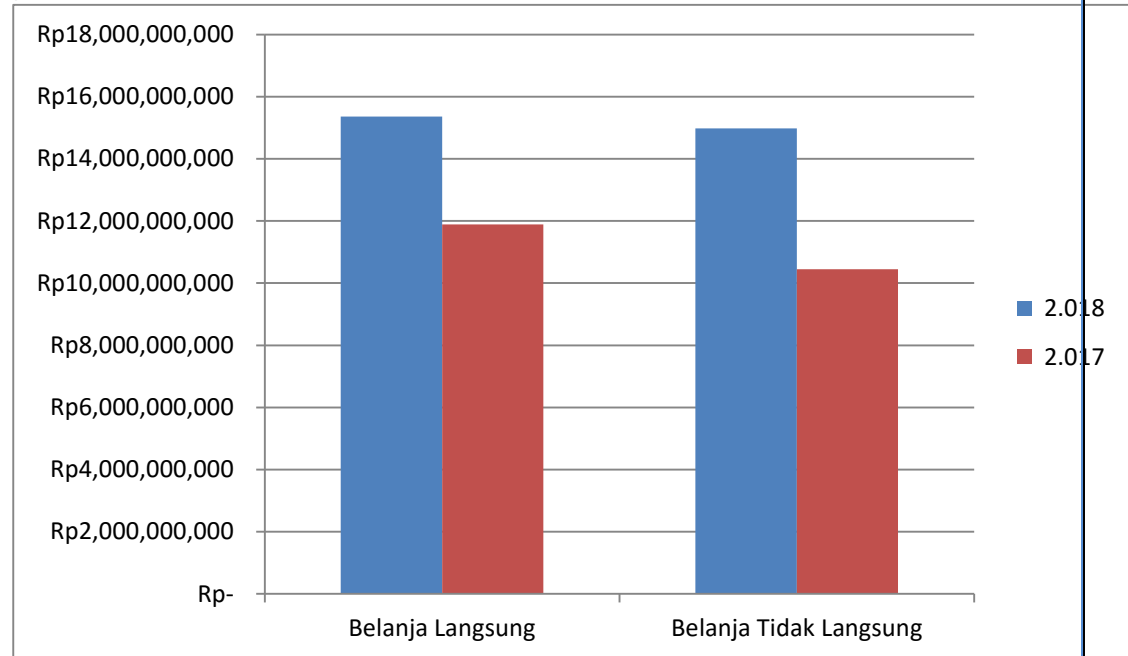
Realisasi Belanja Rp
Rp30.432.934.174

Belanja

Realisasi Belanja Kecamatan Bontang Utara pada TA 2018 adalah sebesar Rp30.432.934.174 atau 92,56% dari anggaran belanja sebesar Rp32.880.404.295,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja pegawai	Rp 17.229.898.495	Rp 15.658.086.911	90,8774182
Belanja Barang	Rp 11.623.833.800	Rp 10.850.266.472	93,34498977
Belanja Modal	Rp 4.026.672.000	Rp 3.834.016.691	95,21552019
Total	Rp 32.880.404.295	Rp 30.342.370.074	

Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung TA 2018 dan 2017 dapat dilihat dalam grafik berikut :



Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan pagu anggaran belanja Kecamatan Bontang Utara, sebagai bentuk realisasi program Prodata (Program Dua Ratus Juta Per RT).

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	15.658.086.911	13.105.919.537	83,70
Belanja Barang	10.850.266.472	9.066.743.467	83,56
Belanja Modal	3.834.016.691	167.737.900	4,37
Jumlah	30.342.370.074	22.340.400.904	73,63

Belanja Pegawai
Rp15.658.086.911

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.105.919.537,00 dan Rp 15.658.086.911,-. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 83,70 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan terhadap tunjangan kinerja Pegawai ASN pada Kecamatan dan 6 perangkat kecamatan yakni Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Api Api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, dan Kelurahan Bontang Kuala.
2. Penyesuaian kenaikan gaji PNS.
3. Mutasi PNS dari perangkat daerah lain ke Kecamatan Bontang Utara.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.891.064.304	6.903.545.083	100,18
Belanja tambahan penghasilan PNS	8.086.919.107	3.547.660.167	43,87
Honorarium PNS	2.720.000	600.000	22,06
Honorarium Non PNS	97.050.000	82.300.000	84,80
Tunj kinerja	580.333.500	2.571.814.287	443,16
Jumlah Belanja	15.658.086.911	13.105.919.537	83,70

Belanja Barang Rp
10.833.480.472,00

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.833.480.472 dan Rp 9.065.743.467. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 83,68% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang jasa penyediaan tenaga administrasi dari rekening tunjangan kinerja tidak tetap pegawai dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja bahan pakai habis	1.694.332.975	276.111.880	16,30
Belanja bahan/material	237.534.013	33.688.250	14,18
Belanja jasa kantor	5.656.391.413	4.519.332.197	79,90
Belanja perawatan kendaraan	256.217.130	138.357.170	54,00
Belanja cetak dan penggandaan	250.369.365	242.513.545	96,86
Belanja sewa rumah/gudang/gedung/parkir/ dan peralatan kantor	14.000.000	6.000.000	42,86
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	23.340.000	8.044.000	34,46
Belanja makanan dan minuman	700.544.400	434.225.900	61,98
Belanja pakaian dinas dan atribut	1.999.800	17.266.700	863,42
Belanja pakaian kerja	1.287.000	0	-
Belanja pakaian khusus hari ha	226.667.900	0	-
Belanja perjalanan dinas	989.898.346	454.471.609	45,91
Belanja kursus, pelatihan, sosia	100.800.000	97.250.000	96,48
Belanja pemeliharaan	256.796.130	76.566.940	29,82
Belanja Jasa Konsultansi	23.452.000	0	-
Belanja barang yang akan dise	24.123.500	2.676.265.276	11.094,02
Belanja Jasa Pekerja Harian	37.800.000	25.600.000	67,72
Belanja Hibah Barang atau Jas	171.908.000	0	-
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	148.050.000	60.050.000	40,56
Belanja Jasa Lainnya	17.968.500	0	-
Jumlah Belanja	10.833.480.472	9.065.743.467	83,68

Kontribusi terbesar realisasi belanja barang jasa berasal dari belanja jasa kantor pada kegiatan penyediaan tenaga administrasi perkantoran sebesar Rp 5.656.391.413 dan belanja bahan habis pakai sebesar Rp 1.694.332.975,00.

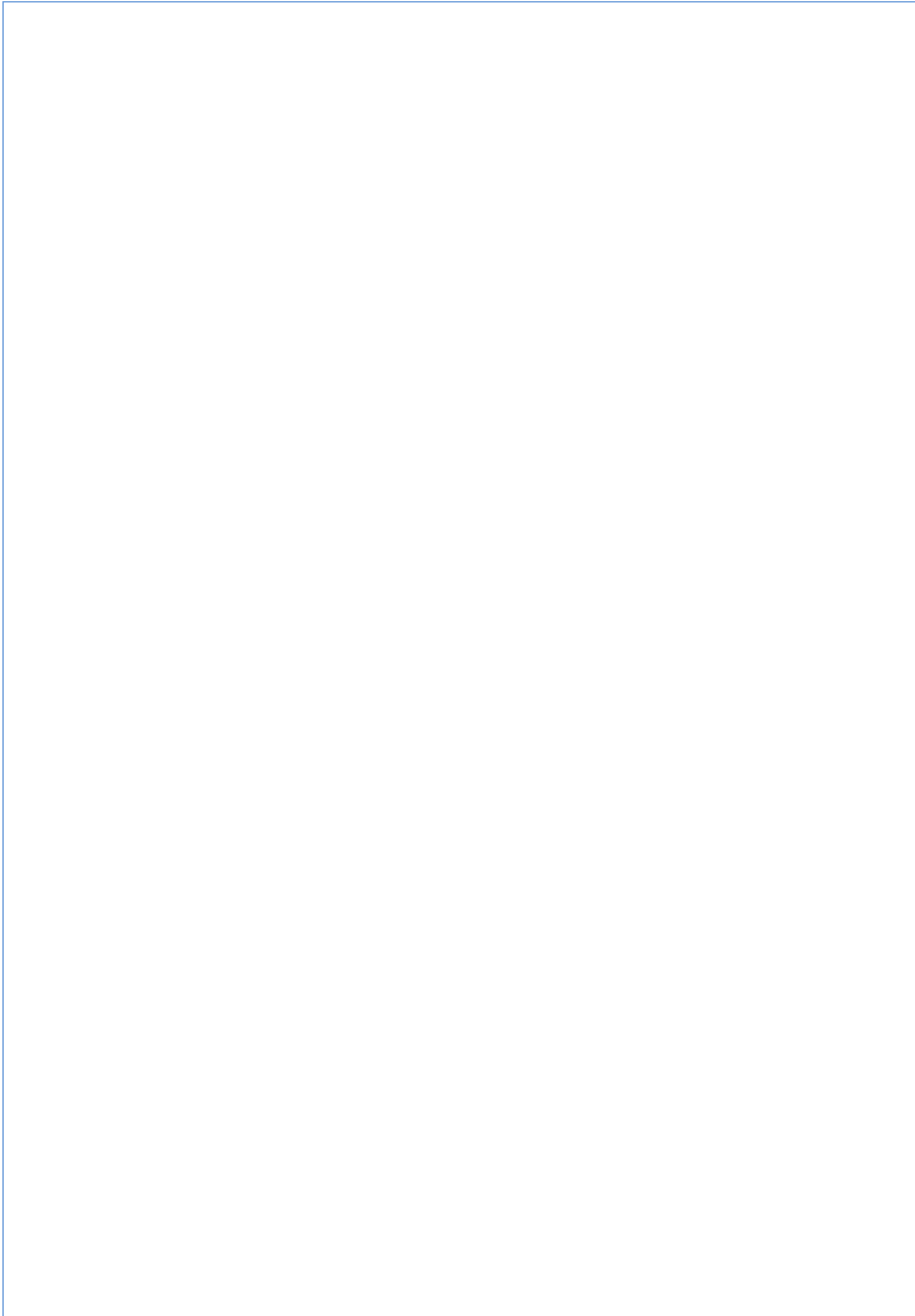
*Belanja Modal Rp
3.941.366.791*

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2018 Kecamatan adalah masing-masing sebesar Rp3.941.366.791 dan Rp Modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 232 per Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan penan terhadap belanja TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal T

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	Naik (Turun) %
Belanja modal pengadaan tanah	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Belanja modal pengadaan alat alat berat	86.988.000	0	0,00
Belanja modal pengadaan alat alat angkutan darat bermotor	1.100.000	0	
Belanja modal pengadaan alat alat bengkel	12.540.000	0	
Belanja modal pengadaan alat alat pengolahan pertanian dan peternakan	9.559.000	0	
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	1.232.446.940	14.586.000	
Belanja modal pengadaan komputer	480.774.580	113.070.100	
Belanja modal pengadaan meubelair	487.183.510	34.302.400	
Belanja modal pengadaan peralatan dapur	14.359.950	0	
Belanja modal pengadaan alat alat studio	274.398.300	5.779.400	
Belanja modal pengadaan alat alat komunikasi	7.810.000	0	
Belanja modal pengadaan alat alat ukur	0	0	
Belanja modal pengadaan perlengkapan jalan	122.568.000	0	
Belanja modal pengadaan peralatan penerangan jalan, taman dan hutan kota	512.695.425	0	
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian *)bangunan	605.207.186	0	
Belanja modal pengadaan alat alat pemadam kebakaran	22.928.400	0	
Belanja modal aset tak berwujud	65.808.000	0	
Belanja modal pengadaan peralatan SAR/Keselamatan	4.999.500	0	



Penjelasan Atas Neraca

Persediaan

Rp109.623.725

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 109.623.725 dan Rp101.640.160.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TH 2018	TH 2017
Alat Tulis Kantor	57.532.485	58.791.380
Barang cetakan	17.325.990	34.124.360
BBM	33.336.000	6.105.000
Alat kebersihan kantor	1.240.250	1.884.820
Persediaan benda pos	189.000	739.000
Jumlah	109.623.725	101.644.560

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

ASET TETAP

Tanah

Rp5.307.869.401,00

Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kecamatan Bontang Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 5.307.869.401. Tidak terdapat kenaikan pada aset tanah.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Lokasi	Aset 2018	Aset 2017
1	Kecamatan	1.711.852.000	1.711.852.000
2	Guntung	14.495.000	14.495.000
3	Bontang Baru	3.581.522.401	3.581.522.401
Jumlah		5.307.869.401	5.307.869.401

Peralatan dan

Mesin

Rp11.373.574.281,00

Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp11.373.574.281 dan Rp9.023.060.401. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Akhir 2017	9.023.060.401
Mutasi tambah	2.654.872.230
	11.677.932.631
Mutasi berkurang	304.358.350
	11.373.574.281
Saldo Akhir 2018	11.373.574.281
Nilai buku perolehan 2018	11.373.574.281

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Belanja modal Kecamatan sebesar Rp 376.795.000,-
- Belanja modal Bontang Kuala sebesar Rp 327.892.400,-
- Belanja Modal Gunung Elai sebesar Rp 316.195.000,-
- Belanja modal Loktuan sebesar Rp 348.241.740,-
- Belanja modal Api Api sebesar Rp 437.397.400,-
- Belanja modal Guntung sebesar Rp 130.913.640,-
- Belanja Modal Bontang Baru sebesar Rp 697.653.000,-
- Kemudian terdapat pengurangan dari reklas barang dan jasa (soundsystem 2 buah dan wirelss RT 11 Kelurahan Guntung

yang mengalami kesalahan pada belanja rekening sebesar Rp 19.784.050,-

Sedangkan mutasi kurang peralatan dan mesin berupa ;

- a. reklass ke ekstrakomtabel berupa kursi Rp 473.000 x 50 buah sebesar Rp 23.650.000
- b. Reklas ke KIB C berupa pintu gerbang sebesar Rp 34.100.000,-
- c. Reklas ke beban persediaan gorden sebesar Rp 99.298.100,-
- d. Terdapat mutasi ke ekstrakomtabel sebesar Rp 49.995.000,-
- e. Usulan penghapusan (dipindah ke aset lain lain) sebesar Rp 60.432.800,-
- f. Pengurangan ke belanja modal 2018 pindah ke ekstrakomtabel sebesar Rp 499.950,-
- g. Reklass ke ekstrakomptabel TA 2018 sebesar Rp742.500,-
- h. Reklass ke ekstrakomptabel sebesar Rp 35.640.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan

Bangunan

Rp32.543.163.634

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp32.543.163.634,- dan Rp13.417.768.590. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	13.417.768.590
Mutasi tambah	19.387.790.373
mutasi kurang	262.395.329
Saldo per 31 Desember 2018	32.543.163.634
Nilai Buku per 31 Desember 2018	32.543.163.634

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari

penambahan dengan rincian dibawah ini :

- a. Belanja modal Kecamatan pada tahun 2018 sebesar Rp 292.000.000,-
- b. Reklas dari KIB berupa pintu gerbang sebesar Rp 34.100.000,-
- c. Reklas dari Aset tak berwujud sebesar Rp 7.420.000,-
- d. Penambahan mutasi dari Dinas PUPR sebesar Rp 18.533.278.536,-
- e. Belanja modal 2018 kelurahan Bontang Kuala sebesar Rp 135.019.000,-
- f. Belanja modal 2018 kelurahan Api Api sebesar Rp 9.807.6000,-
- g. Belanja modal 2018 Kelurahan Bontang Baru sebesar Rp 168.380.586,-
- h. Mutasi tambah dari Dinas PUPR sebesar Rp 207.784.651,-

Sedangkan transaksi aset gedung dan bangunan yang mengalami pengurangan dibawah ini :

- a. Reklass ke barang dan jasa (pemeliharaan plafon) Kecamatan sebesar Rp 99.200.000,-
- b. Reklass ke persediaan ke konstruksi taman (pengadaan tumbuh tumbuhan dan pos kecamatan) sebesar Rp 43.560.937,-
- c. Reklass dari KIB C ke D (kesalahan kode barang dari DPUPR) ke kecamatan sebesar Rp 103.787.729,-
- d. Ekstrakomtabel semester 1 2018 (Kecamatan) sebesar Rp 6.039.063,-
- e. Reklass ke ekstrakomtabel (pagar Kelurahan Api Api) sebesar Rp 9.807.600,-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran

Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp
836.460.154*

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 836.460.154 dan Rp97.409.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan 2018 adalah sebagai berikut .

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	97.409.000
Mutasi tambah	739.051.154
Saldo per 31 Desember 2018	836.460.154
Nilai Buku per 31 Desember 2018	836.460.154

Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berasal dari akumulasi belanja modal pada tahun 2018 dapat dijabarkan dibawah ini :

- Belanja modal Kecamatan sebesar Rp 103.787.729,-
- Belanja modal Kelurahan Bontang Kuala sebesar Rp 23.707.200,-
- Belanja modal Kelurahan Gunung Elai sebesar Rp 304.676.625,-
- Belanja modal Kelurahan Loktuan sebesar Rp 57.388.100,-
- Belanja modal Kelurahan Guntung sebesar Rp 44.767.800,-
- Belanja modal Kelurahan Bontang Baru sebesar Rp 204.723.700,-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah (Rp11.298.260.111). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp(11.298.260.111). merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Per 2017	(8.569.430.027)
Peralatan dan Mesin	2.520.080.696
Gedung dan Bangunan	985.795.628
Jalan, irigasi, dan jaringan	5.000.000
Akumulasi Penyusutan 31 Des 2018	(11.298.260.111)

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 Kecamatan Bontang Utara adalah masing masing Rp 250.809.994,00 dan Rp 191.701.994.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada tahun 2018 adalah sebesar Rp (168.734.290,00) dan tahun 2017 adalah sebesar Rp (139.581.692,00).

Aset Tetap Lainnya **Aset tetap Lainnya**

Rp 29.851.500,-

Aset tetap lainnya tidak mengalami perubahan nilai perolehan hingga pada akhir tahun 2018 yakni sebesar Rp 29.851.500,-.

Aset Tak Berwujud **Aset Tak Berwujud**

Rp 250.809.994,-

Kondisi aset tak berwujud Kecamatan Bontang Utara dapat dirinci dibawah ini :

Saldo Awal Tahun 2017		191.701.994
Mutasi tambah		
Belanja modal Kecamatan Th 2017	65.808.000	
atribusi	720.000	
		66.528.000
Mutasi Kurang		
Reklass ke KIB C		7.420.000
Saldo Akhir Tahun 2018		250.809.994
Nilai Perolehan Tahun 2018		250.809.994

Aset Lain-Lain

Rp33.878.567

Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp33.878.567 dan Rp 38.563.452,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Utang Belanja Rp

716.003.315,00

Utang Belanja

Nilai Utang belanja per 31 Desember 2018 adaah sebesar Rp716.003.315,00. Utang belanja merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan pada bulan berikutnya. Adapun rincian Utang belanja Kecamatan Bontang Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Belanja

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Uang Makan	79.256.000	
Tambahan Penghasilan Pegawai	591.427.315	
Belanja Jasa	45.320.000	Pembayaran advertorial
Total	716.003.315	

Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Operasional

Beban Pegawai

Rp16.041.601.476,-

Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp16.041.601.476,- dan tahun 2017 sebesar Rp 12.921.763.040,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Uraian Jenis Beban	2018
Gaji Pokok PNS/Tunj Representatif	5.278.593.752
Tunjangan Keluarga	575.452.308
Tunjangan Jabatan	286.270.000
Tunjangan Fungsional	3.480.000
Tunjangan Fungsional Umum	229.150.000
Tunjangan Beras	366.734.880
Tunjangan PPh	222.564
Pembulatan Gaji	87.568
Iuran Jaminan Kesehatan	151.073.232
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	7.698.401.422
uang makan	1.059.201.000
Beban uang kinerja	392.934.750
JUMLAH	16.041.603.494

Beban Persediaan
Rp2.673.863.460,-

Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 sebesar Rp2.673.863.460,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 sebagai berikut:

Uraian	Th 2018
Beban persediaan alat tulis kantor	411.829.165,00
Beban persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	24.534.805,00
Beban persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	10.498.000,00
Beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.741.570,00
Beban persediaan bahan bakar minyak/gas	6.105.000,00
Beban persediaan pengisian isi tabung gas	305.500,00
Beban persediaan souvenir/hadiah/piala	28.417.000,00
Beban persediaan perlengkapan dan peralatan olah raga	186.368.710,00
Beban persediaan alat kebersihan/keindahan	29.328.720,00
Beban persediaan peralatan/perlengkapan lomba	7.800.000,00
Beban persediaan perlengkapan kantor	147.820.500,00
Beban persediaan peralatan kantor	3.124.200,00
Beban persediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga/dapur	100.387.100,00
Beban persediaan peralatan komputer, printer, jaringan komputer dan kelengkapannya	11.273.900,00
Beban persediaan alat-alat ukur	1.980.000,00
Beban persediaan penghias ruangan kantor/rumah tangga	165.645.150,00
Beban persediaan papan nama	2.970.000,00
Beban persediaan alat/material listrik lampu penerangan jalan dan kelengkapannya	185.738.520,00
Beban persediaan bendera	11.515.680,00
Beban persediaan umbul-umbul	14.746.710,00
Beban persediaan pot tanaman	8.910.000,00
Beban persediaan tempat/tong sampah	51.008.100,00
Beban persediaan kursi plastik	286.980.430,00
Beban persediaan kursi lipat	69.333.000,00
Beban persediaan tiang umbul-umbul	26.171.750,00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	100.638.780,00
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	48.609.937,00
Beban Persediaan makanan pokok	25.304.020,00
Beban Persediaan bahan peralatan/perlengkapan	105.651.213,00
Beban Persediaan tanah/pasir media tanam	891.000,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	163.248.800,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.999.800,00
Beban pakaian kerja lapangan	1.287.000,00
Beban pakaian olahraga	25.985.000,00
Beban pakaian kostum	200.682.900,00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.031.500,00
Jumlah	2.673.863.460,00

Beban Jasa

Rp7.192.168.008,-

Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.192.168.008,- dan Rp5.341.705.362,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018
Beban Jasa telepon	7.436.213,00
Beban Jasa air	22.920.375,00
Beban Jasa listrik	216.874.423,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	5.016.000,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	426.210.212,00
Beban jasa publikasi dan dokumentasi	98.870.000,00
Beban Jasa pengisian air minum isi ulang	620.000,00
Beban jasa transport dan akomodasi	71.125.000,00
Beban jasa media televisi	1.320.000,00
Beban jasa pemasangan instalasi listrik	72.732.690,00
Beban jasa pemasangan instalasi air bersih	12.479.500,00
Beban Jasa Service	41.537.630,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.094.700,00
Beban Cetak	66.137.405,00
Beban penggunaan/fotocopy	102.083.625,00
Beban cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi	82.148.335,00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	14.000.000,00
Beban sewa sound system	7.500.000,00
Beban sewa tarub	15.840.000,00
Beban makanan dan minuman rapat	105.358.400,00
Beban makanan dan minuman tamu	26.997.120,00
Beban makanan dan minuman kegiatan	568.188.880,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	5.190.000,00
Beban jasa konsultansi kajian akademik	23.452.000,00
Beban kontribusi	100.800.000,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	85.675.000,00
Beban honorarium panitia pelaksana kegiatan	2.000.000,00
Beban honorarium pegawai honorer/tidak tetap	4.035.442.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	37.050.000,00
Honorarium tim pelaksana kegiatan	6.400.000,00
Honorarium tenaga keamanan dari TNI/POLRI	53.600.000,00
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	162.800.000,00
Beban jasa pelayanan kesehatan	640.500.000,00
Beban jasa pekerja harian lepas	37.800.000,00
JUMLAH	7.192.168.008,00

Beban

Pemeliharaan

Rp336.212.080,-

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp336.212.080,- dan Rp76.566.940,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.173.580		
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.039.000		
Beban Pemeliharaan Aset lainnya	10.999.500		
Jumlah	176.173.580		

Beban Perjalanan

Dinas

Rp989.898.346,-

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp989.898.346,- dan Rp454.471.609,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018		
Beban perjalanan dinas dalam daerah	395.458.090,00		
Beban perjalanan dinas luar daerah	566.686.256,00		
Beban perjalanan dinas luar daerah bagi masyarakat	14.534.000,00		
Jumlah	989.898.346		

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
19.311.454.029,00*

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 19.311.454.029 dan Rp 13.224.061.976.

*Surplus Defisit LO
Rp(Rp28.958.004.51
3,00)*

Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp28.958.004.513,00) dan (Rp22.405.560.734,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Ekuitas Akhir
Rp38.302.233.540,00*

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 38.302.233.540,00.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Gambaran Umum

Kecamatan Bontang Utara merupakan perangkat daerah Kota Bontang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Walikota Bontang melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.

Dasar pembentukan Kecamatan Bontang Utara merujuk pada sejumlah regulasi yaitu :

- Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki wilayah kerja dan kewenangan yang langsung dilimpahkan, Kecamatan memiliki aspek strategis dalam pencapaian visi misi Pemerintahan.

Berdasarkan prinsip *'close to the customers'* sudah seharusnya Pemerintah memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat. Hal ini pun telah tertuang dalam Permendagri nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dengan PATEN, Kecamatan dapat berfungsi sebagai :

- Pusat Pelayanan Masyarakat
- Simpul Pelayanan bagi kantor / badan pelayanan terpadu di Kota Bontang
- Fasilitator dan Mediator penyelesaian permasalahan permasalahan sosial, politik, agama dan urusan kemasyarakatan lainnya.

Tugas, Pokok dan Fungsi

Menurut PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan adalah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah dan dipimpin seorang Camat yang menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.

5. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pada pasal (15) disebutkan pula kewenangan lain sebagaimana pelimpahan kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

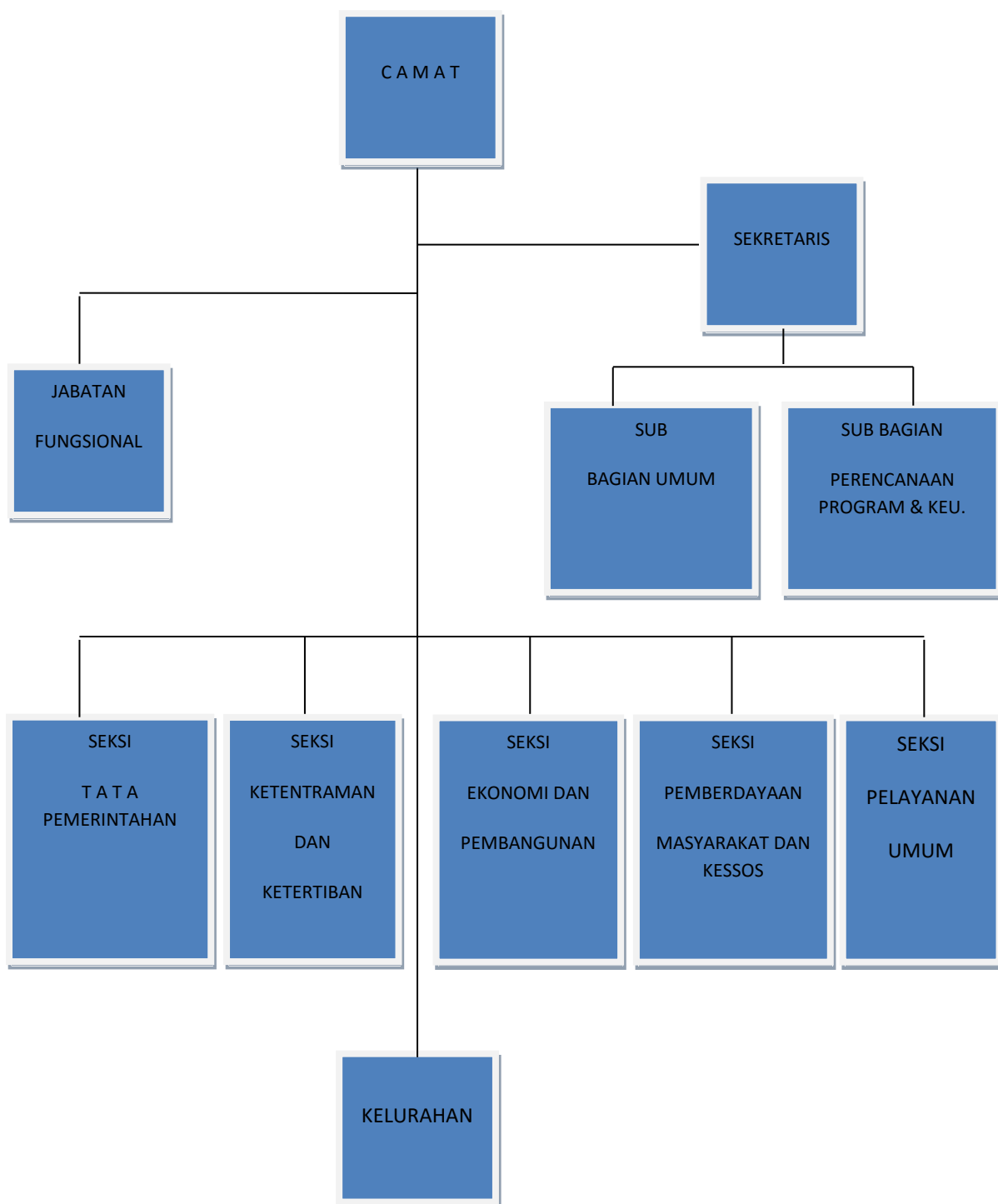
- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sementara sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka tugas pokok Camat adalah menjalankan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. **Menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan**, dalam hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan pemerintahan dengan asas desentralisasi
- b. **Menyelenggarakan koordinasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kecamatan**, dalam hal ini Kecamatan harus mampu melakukan koordinasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program dan kegiatan di wilayah kerja kecamatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan unit kerja tersebut, melakukan evaluasi dan mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di wilayahnya.

Struktur Organisasi



Realisasi Belanja berdasarkan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 di Kecamatan Bontang Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara TA 2018 ini dibuat untuk menjadi bahan konsolidasi dan evaluasi Kecamatan Bontang Utara kedepannya.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan PPKD Kecamatan Bontang Kota Bontang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran

Zemmy Hasz,SE

Nip. 19611115 199103 1 005